

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Kepmen. Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Pedoman Bidang Penataan Ruang).

2.2. Pengertian Kawasan

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Undang-undang No 26 Tahun 2007 Pasal 1).
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (Undang-undang No 26 Tahun 2007 Pasal 1).
Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Undang-undang No 26 Tahun 2007 Pasal 1).
2. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Undang-undang No 26 Tahun 2007 Pasal 1).
3. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (Undang-undang No 26 Tahun 2007 Pasal 1).

2.3. Kawasan Sentra Produksi

Menurut Soemarno (1996:5), sentra produksi adalah suatu kawasan budidaya /produksi yang memiliki potensi dan telah memperoleh investasi pemerintah/

swasta/masyarakat, yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut serta menjadi sebaran pengembangan kegiatan produksi, jasa dan permukiman, prasarana wilayah pendukung dan prasarana wilayah pengembangannya.

Program Kawasan Sentra Produksi pada dasarnya secara teknis mengkaitkan kegiatan produksi dan pemasaran melalui pengembangan kelembagaan bisnis yang meliputi seluruh proses kegiatan agrobisnis sub sistem produksi dan pendukungnya, sub sistem pengolahan dan sub sistem distribusi pemasaran, sehingga dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi semua pelaku pembangunan secara optimal (Soemarno, 2005:2).

2.3.1. Asas Pengembangan Sentra Produksi

Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam strategi pengembangan sentra produksi antara lain (Soemarno, 1996:374):

1. Asas kesesuaian

Pemilihan komoditas tanaman yang akan dikembangkan dengan memperhatikan kesesuaian komoditas tersebut terhadap aspek biofisik, sosial, dan ekonomi

a. Kesesuaian biofisik

Meliputi kesesuaian terhadap kondisi iklim dan lahan. Pengembangan komoditas tanaman pada suatu kawasan seharusnya didasarkan kepada kesesuaian tanaman tersebut dengan kondisi iklim dan lahan kawasan pengembangan. Semakin tinggi tingkat kesesuaian tanaman, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya.

b. Kesesuaian ekonomi

Pengembangan komoditas diharapkan mampu bersaing di pasar lokal, regional bahkan internasional.

c. Kesesuaian sosial

Meliputi kesesuaian keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu komoditas dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat

2. Asas kelestarian

Pemilihan lokasi pengembangan sentra produksi diharapkan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya lahan kawasan pengembangan. Beberapa komoditas dapat dikembangkan pada suatu kawasan tanpa memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, namun sebaliknya mungkin tidak cocok dikembangkan di kawasan lain.

2.3.2. Kajian Pengembangan Sentra Produksi

Pendekatan – pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji pengembangan sentra produksi antara lain (Soemarno, 1996:374):

1. Pemilihan komoditas tanaman unggulan

Komoditas yang akan diprioritaskan pengembangannya dikaji terlebih dahulu dengan pendekatan – pendekatan, antara lain :

a. Kesesuaian biofisik

Komoditas yang dikembangkan hanyalah komoditi yang sesuai dengan kondisi kawasan pengembangan. Untuk menganalisisnya dapat menggunakan analisis kesesuaian lahan yang direkomendasikan oleh FAO yang telah disesuaikan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor agar sesuai dengan kondisi tanah di Indonesia. Data yang dibutuhkan yaitu yang berkaitan dengan iklim dan fisik/kimiawi lahan pengembangan komoditas.

b. Kesesuaian ekonomi

Kesesuaian ekonomi ini terkait dengan tingkat prospek pemasaran komoditas yang akan dikembangkan serta besarnya pengaruh komoditas tanaman tersebut sebagai penggerak perekonomian wilayah. Tingkatan prospek pemasaran dapat dinilai cukup baik pada tingkat lokal, regional atau hingga tingkat internasional. Metode yang dapat digunakan yaitu, biaya sumber daya domestik, analisis input – output, *location quotient*, dan sebagainya.

c. Kesesuaian sosial

Pemilihan komoditas yang diunggulkan diprioritaskan pada komoditi yang telah dikenal oleh masyarakat setempat atau komoditas tanaman baru yang diyakini dapat dikembangkan di wilayah atau di tengah – tengah masyarakat tersebut. Analisis yang digunakan dapat dilakukan secara deskriptif atau menggunakan analisis kesesuaian sosio– teknologis.

d. Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan

Komoditas tanaman pangan yang akan dikembangkan tidak merusak lingkungan fisik kawasan pengembangan.

e. Kewajiban nasional

Sebagai contoh pendekatan ini adalah pengembangan komoditas tanaman padi sebagai kewajiban untuk menyediakan stok pangan nasional.

2. Pemilihan lokasi penunjang

Pemilihan lokasi/sentra pengembangan komoditas tanaman unggulan dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

a. Kesesuaian fisik

Pengembangan komoditas hanya dilakukan pada lokasi yang sesuai, berdasarkan iklim dan sifat lahannya.

b. Kesesuaian ekonomi

Lokasi pengembangan dipilih berdasarkan keunggulan lokasi yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan komoditas tanaman yang berdaya saing tinggi.

c. Kesesuaian sosial

Komoditas dikembangkan pada lokasi dimana masyarakatnya dapat memberikan partisipasi aktif.

d. Kelestarian lingkungan hidup

Lokasi pengembangan diarahkan kepada lokasi yang tidak rawan erosi, bukan daerah resapan air hujan, atau daerah-daerah kritis lainnya. Penetapan daerah harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Keppres No.32 Tahun 1990.

e. Keterkaitan dengan konsepsi agribisnis

Selain mengikuti kriteria kelestarian dan kesesuaian, sebaiknya lokasi pengembangan mempertimbangkan lokasi produksi yang akan menggunakan hasil produksi komoditas tanaman.

f. Keterkaitan dengan pusat-pusat pelayanan lokal dan regional

3. Identifikasi faktor-faktor penunjang

Menurut Soemarno (1996:377), terdapat lima faktor yang menunjang keberhasilan suatu program pengembangan sentra produksi. Kelima faktor tersebut antara lain:

a. Struktur tata ruang

Pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin kesempatan ekonomi yang dimiliki oleh lahan. Kesempatan ekonomi tersebut ditentukan oleh faktor intern yang dimiliki lahan, seperti ketersediaan unsur hara, ketebalan lapisan tanah dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, juga ditentukan oleh faktor ekstern seperti aksesibilitas lokasi.

b. Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan baik formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun kelembagaan non-formal yang dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat setempat. Kelembagaan ini dibutuhkan untuk menunjang program pengembangan sentra produksi, antara lain kelembagaan yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran dan keuangan.

Lembaga yang berkaitan dengan faktor produksi berfungsi sebagai lembaga yang membantu masyarakat memecahkan masalah atau hambatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi. selain itu, lembaga ini berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, jika pemerintah memiliki ide baru atau ingin mengenalkan teknologi baru yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Lembaga keuangan bank dan non-bank merupakan salah satu faktor penunjang kelangsungan program pengembangan sentra produksi, karena banyak kasus kegiatan produksi atau pemasaran terhambat karena tidak tersedianya dukungan keuangan. Bentuk kelembagaan lain yang perlu dikembangkan yaitu, lembaga yang menghimpun petani-petani yang mengembangkan komoditas tanaman yang sama pada suatu kawasan pengembangan.

c. Teknologi

Peranan teknologi merupakan salah satu faktor penentu dalam usaha peningkatan produktivitas, bahkan daya saing untuk komoditas tanaman teknologi tepat guna perlu dikaji lebih lanjut.

d. Kualitas sumberdaya masyarakat

Kualitas sumberdaya masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pengembangan sentra produksi, karena berhasil tidaknya bergantung pada tingkat keterampilan dan pengetahuan SDM tersebut. Kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan dengan pengembangan pendidikan formal maupun non-formal serta pusat-pusat pelatihan pada kawasan pengembangan.

e. Sistem informasi

Diperlukan adanya jaringan informasi yang mampu menjangkau para petani di pedesaan. Sistem ini digunakan untuk mentransfer ilmu dan teknologi/keterampilan pada masyarakat, juga berfungsi sebagai informasi pasar bagi para petani serta hal-hal lain yang secara langsung maupun tidak langsung

berkaitan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian, misal cuaca.

2.4. Kawasan Sentra Agribisnis (KSA)

2.4.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan KSA

Soemarno (2006:348) mengidentifikasi tujuan dan sasaran Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis (KSA) sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi Kawasan Sentra dan prioritas berdasarkan potensi subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan untuk dikembangkan menjadi suatu KSA.
- b. Menentukan alokasi budidaya komoditi subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan di masing-masing KSA
- c. Menyusun konsep peningkatan intensitas pertanaman lahan basah dan lahan kering untuk meningkatkan produksi pangan dan produksi berbagai komoditi agribisnis, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, memanfaatkan peluang pasar dan penggalian sumber ekonomi.
- d. Menyusun konsep pengembangan kawasan sentra produksi yang diunggulkan dalam upaya pemerataan pembangunan pertanian dalam arti luas, sebagai kegiatan usaha untuk peningkatan nilai tambah produk primer yang dihasilkan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis adalah tersedianya informasi tentang:

- a. Kawasan Sentra Produksi terpilih melalui pendekatan ruang dan pengisian ruang melalui skenario pengembangan prioritas kawasan (berjenjang) maupun jenis komoditas yang dikembangkan pada kawasan itu.
- b. Pemanfaatan ruang dan lahan sesuai dengan pengembangan subsektor pertanian tanaman pangan, sub-sektor peternakan, subsektor perikanan dan pengembangan sektor perkebunan
- c. Peluang bursa lapangan usaha yang lebih luas, kompetitif terhadap penerimaan dan penyerapan tenaga kerja yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

- d. Tenaga tenaga kerja siap pakai, tidak hanya terampil tetapi memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berusahatani, sistem produksi komoditi tanaman pangan yang berkesinambungan, bergulir sepanjang tahun guna menjamin persediaan pangan dalam me-ningkatkan ketahanan pangan masyarakat serta menjamin permintaan kebutuhan pangsa pasar
- e. Peningkatan produksi dalam mengantisipasi, tidak hanya penyediaan pangan semata, namun memperhitungkan seberapa besar produksi yang dapat diproses ke nilai tambah, juga pemanfaatan limbah potensial, seperti ikan dan tulang-tulang untuk dikelola menjadi tepung ikan dan tepung tulang sebagai bahan pembuat pakan ternak dan sebagainya.
- f. Penyediaan benih /bibit unggul yang memiliki: umur pendek, produktivitas tinggi dan ketahanan kondisi alam yang tidak menentu (iklim dan curah hujan) serta resisten terhadap hama dan penyakit.
- g. Sarana produksi termasuk pestisida, hipertisida dan herbisida yang mudah diperoleh di setiap kawasan, relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat petani setempat dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan meningkatkan ketahanan pangan.
- h. Jasa pelayanan perbankan dan sistem infor-masinya mengenai kendala dan persoalan dalam upaya pem-berdayaan kegiatan usahatani, misalnya sistem Kredit Usaha Tani (KUT).
- i. Jasa pelayanan Koperasi, Dolog sebagai mitra petani dan berperan dalam meningkatkan daya beli hasil-hasil produksi komoditi, dengan harga dasar ketetapan nasional sehingga harga dapat terkendali dan tidak dikendalikan oleh para tengkulak yang selama ini menjerat para petani di wilayah sentra produksi.
- j. Prasarana produksi bila mungkin tersedianya jaringan irigasi, listrik, air bersih, telekomunikasi di setiap Kawasan Sentra Agribisnis dalam upaya pengembangan pangan dan perikanan.
- k. Sistem transportasi dan pola aliran barang dari sentra produksi ke penyimpanan sementara/gudang, ke tempat distribusi barang hingga sampai ke tempat tujuan tujuan (pengolahan, pedagang) maupun pasar sebagai konsumen akhir.
- l. Alokasi pasar dan sistem pemasaran dari sentra produksi ke penyimpanan sementara, ke distribusi barang hingga sampai pada tempat tujuan (pengolahan, pedagang) maupun pasar sebagai konsumen akhir.

2.4.2. Ruang Lingkup Materi Pengembangan KSA

Menurut Soemarno (2006:353), Ruang lingkup materi/substansi dalam pengembangan kawasan agribisnis antara lain adalah:

1. Kebijakan pengembangan tata ruang. Kebijaksanaan ketata-ruangan berkaitan dengan struktur pengembangan wilayah dan pengembangan sektoral yang dijabarkan dalam pokok-pokok pembangunan daerah.
2. Identifikasi komoditi pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan.
3. Kondisi kawasan dan kecenderungan perkembangannya, dapat diidentifikasi potensi yang meliputi antara lain:
 - a. Potensi yang terkandung, baik yang sudah dimanfaatkan, belum dimanfaatkan dan diperkirakan ada, termasuk di dalamnya identifikasi komoditas unggulan kawasan.
 - b. Prospek dan kemungkinan pengembangan komoditi agribisnis di masa mendatang, baik menyangkut produksi peningkatan nilai tambah maupun pemasarannya, menuntut perlunya kawasan pengembangan sentra produksi. Karena peluang di masa mendatang menghadapi era globalisasi paling tidak dapat mengantisipasi kemampuan daya saing produksi, pemasaran dan pangsa pasar yang dapat diraih.
4. Penyusunan Skenario Pengembangan Kawasan. Skenario pengembangan kawasan ditempuh melalui skala prioritas pemanfaatan ruang dan skala prioritas kegiatan pengembangan komoditi unggulan. Skenario pengembangan berisi pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang, yaitu pengembangan komoditas tanaman pangan dan perikanan serta sistem prasarana penunjangnya dan merupakan acuan pengembangan kawasan.
5. Perumusan program pengembangan sektor, komoditas unggulan dan sistem prasarana. Rumusan program pengembangan berisi program-program pengembangan komoditas dan sistem sarana dan prasarana agrisupport. Program-program dirumuskan dalam mendukung pencapaian skenario-skenario tersebut.
6. Perumusan program-program pengembangan yang terpilih. Program ini merupakan interaktif antara kondisi, kemampuan pembiayaan dan kelembagaan dengan pengembangan kawasan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukungnya, di mana proses ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga meng-

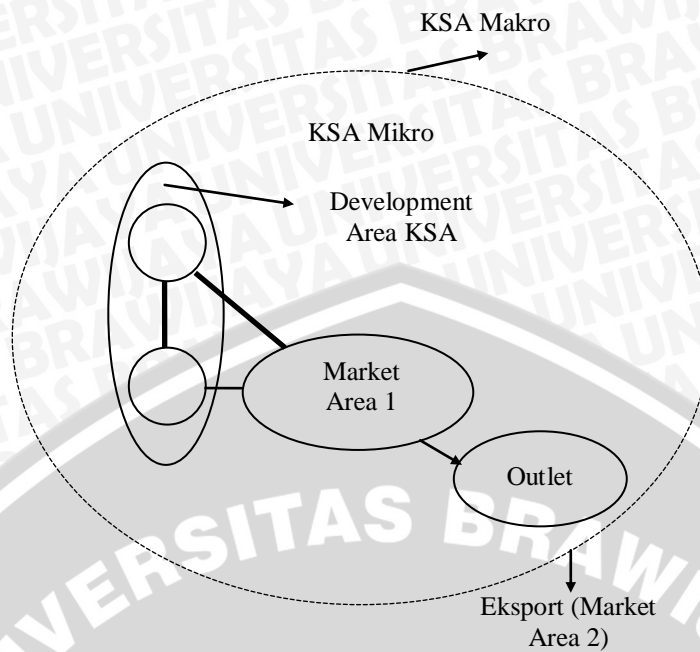
hasilkan suatu tatanan program yang terarah. Rumusan program ini berisi rencana program pengembangan kawasan yang meliputi: besaran penyediaan, lokasi spesifiknya, aspek pembiayaan dan pelaksanaannya serta tahapan pengembangan. Dalam perumusan program tersebut diharapkan dapat tercapai suatu komitmen pelaksanaan dari pelaku pembangunan.

7. Perumusan peningkatan pemasaran hasil produksi. Sebagai upaya untuk menarik minat dunia usaha dan dapat melakukan investasi di kawasan sentra produksi, informasi mengenai peluang pengembangannya perlu disebarluaskan. Media informasi yang digunakan berupa peta dan leaflet yang berisi potensi pengembangan kawasan, dukungan yang ada dan rencana-rencana investasi.

2.4.3. Ruang Lingkup Wilayah KSA

Penentuan Kawasan Sentra Agribisnis di suatu daerah, seperti, diarahkan pada wilayah-wilayah kabupaten / kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kegiatan agribisnis dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah itu termasuk pasar. Lingkup kawasan tidak dibatasi dengan batas administratif, tetapi ditentukan oleh fungsinya. Dengan demikian, maka lingkup kawasan dapat relatif luas dapat terdiri dari bagian-bagian wilayah kecamatan, bisa juga relatif kecil dapat terdiri dari satu atau lebih dari dua bagian wilayah kecamatan dan atau antar kabupaten/ kota. Besar kecilnya Kawasan Sentra Agribisnis tidak terlepas dari pada faktor potensi dan fungsi kawasan jarak geografis. Adanya perbedaan jarak yang panjang memungkinkan perlunya pemisahan kawasan, sedangkan jarak terpendek antar kawasan potensial cenderung membentuk satu kesatuan Kawasan Sentra Agribisnis (Soemarno 2006:350).

Dalam kaitannya antara batas administratif dengan faktor jarak geografis terhadap kemungkinan terbentuknya kawasan, ada kemungkinan ditemukannya pemisahan dari suatu wilayah kabupaten dan masuk membentuk kawasan baru di suatu wilayah kabupaten lain. Kemungkinan ini dapat saja terjadi di seluruh wilayah kabupaten dan kota, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan langsung secara fisik (Soemarno 2006:351), hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1. Konsep Ruang Pengembangan KSA
Sumber: Soemarno (2006:352)

2.5. Jenis Usaha Perikanan

Perikanan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau budidaya hewan atau tanaman air yang hidup bebas di laut atau perairan umum. Adapun yang dimaksud dengan perikanan ialah segala usaha penangkapan, budidaya ikan serta pengolahan sampai pemasaran hasilnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati (Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Pasal 1).

Ikan merupakan sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaiki diri. Disamping renewable, sumberdaya ikan mempunyai sifat “*open access*” dan “*common property*” yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Sifat ini menunjukkan beberapa konsekuensi, antara lain : tanpa adanya pengelolaan akan

menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan (*over exploitation/over fishing*), intervensi berlebihan (*over investment*) dan tenaga kerja berlebihan (*over employment*). Sebagai komoditi ekonomi, sifat komoditi perikanan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah dan kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah karena sangat tergantung pada keadaan cuaca.
- b. Lokal dan spesifik, tidak dapat diproduksi di semua tempat (Soekartawi, 1999:177).
- c. Perputaran modal cepat
- d. Jumlahnya banyak tetapi nilainya relative sedikit (Soekartawi, 1999:177).
- e. Mudah rusak (*perishable*) dan resiko tinggi jika pemasarannya tidak cepat sampai ke konsumen harga ikan bisa turun drastis (Rahardi. F, et al 1993:5).

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan subsektor perikanan diantaranya : nelayan, tengkulak ikan atau pedagang pengumpul, koperasi perikanan, pengusaha perikanan, konsumen ikan dan Departemen Kelautan dan Perikanan baik pada tingkat nasional dan propinsi serta Dinas Perikanan dan Kelautan di kabupaten/kota.

2.5.1. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perikanan, perikanan tangkap merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Perikanan tangkap menggunakan peralatan utama yang dilengkapi dengan alat tangkap, baik kapal bermotor maupun non motor. Alat tangkap yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia diantaranya : (a) *long line*, (b) *pole and line*, (c) jaring insang hanyut (*drift grill net*), (d) pukat cincin (*purse seine*) atau jangkar lingkar (Rencana Tata Ruang Laut dan Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2008).

2.5.2. Perikanan Budidaya

Menurut M. Ghufran (2008:9) pengertian perikanan budidaya dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup secara liar di alam menjadi komoditas budidaya. Sedangkan dalam pengertian luas, semua usaha membesarkan dan

meperoleh ikan, baik ikan yang masih hidup liar di alam atau yang sudah dibudidayakan melalui campur tangan manusia.

2.5.3. Budidaya Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, budidaya perikanan didefinisikan sebagai kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Usaha dibidang budidaya perikanan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan /atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan. Budidaya perikanan berdasarkan habitatnya dapat dibedakan menjadi dua golongan yang meliputi sebagai berikut :

A. Budidaya perikanan darat

Budidaya perikanan darat dimana ikan yang dibudidayakan ditangkap dan dipelihara di dalam batas garis pantai (garis surut terendah air laut). Budidaya perikanan darat meliputi perikanan air payau atau tambak dan perikanan air tawar yang terdiri dari kolam, sawah, danau, rawa dan sungai.

- **Budidaya perikanan air payau atau tambak**

Tambak merupakan bangunan berupa kolam di daerah pantai yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya biota laut yang berpotensi ekonomi. Sumber air pada tambak merupakan campuran dari air asin dan air tawar. Lokasi tambak yang baik terletak di daerah pantai atau tempat yang masih dipengaruhi oleh lingkungan pantai. Tambak tradisional banyak memanfaatkan pasang surut air laut untuk memasukkan air payau ke dalamnya. Banyaknya air laut yang dapat masuk ke dalam tambak sangat tergantung dari perbedaan tinggi permukaan air laut pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Perbedaan tinggi pasang surut yang baik untuk kehidupan ikan tambak sekitar 1,5 m-2,5 m. ikan dalam tambak dapat hidup baik bila syarat-syarat lingkungan sesuai dengan kondisi hidupnya terpenuhi. Syarat-syarat lingkungan tersebut meliputi kondisi tanah tambak serta jumlah dan mutu air yang terdapat dalam tambak (M Ghufuran 2008:180).

- **Budidaya perikanan air tawar**

Usaha budidaya perikanan air tawar memanfaatkan lahan budidaya dengan ketersediaan air yang cukup dalam menunjang keberlangsungan budidaya perikanan. Perikanan air tawar dapat memanfaatkan kolam, sawah, danau, rawa dan sungai. Keberhasilan usaha perikanan air tawar sangat ditentukan oleh faktor lingkungan yang meliputi kondisi tanah dan ketersediaan air (M Ghufra 2008:163).

B. Budidaya perikanan laut

Budidaya perikanan laut dilakukan dengan mendirikan keramba atau jaring apung yang terletak di laut. Keramba tersebut berfungsi sebagai tempat pembudidayaan, jenis ikan yang dapat dibudidayakan merupakan ikan laut diperoleh baik melalui penebaran benih maupun hasil tangkapan dari alam yang selanjutnya dibudidayakan pada bagan-bagan. Usaha budidaya perikanan laut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim maupun ketersediaan biota laut (M Ghufra 2008:205)

2.6. Nelayan

Menurut undang-undang perikanan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 1 menjelaskan bahwa nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan rumah tangga nelayan adalah merupakan kelompok orang-orang yang bertempat tinggal bersamaan membentuk unit rumah tangga sendiri yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan yaitu dengan melakukan penangkapan ikan di laut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 tahun 2000 tentang perjanjian usaha perikanan disebutkan bahwa “usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial”.

2.7. Tambak

Tambak merupakan jenis budidaya perikanan yang di bangun pada wilayah pesisir pantai dan digunakan untuk budidaya ikan dan udang. Budidaya tambak di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindu pada abad ke 13-14, hal tersebut telah ditulis pada kitab Kutaramenawa, yaitu undang-undang siwakan atau pengaturan air, yang diduga merupakan awal pemeliharaan bandeng dalam tambak di Indonesia (Nontji

dalam M Gufran, 2008 : 180). Ini berarti bahwa perikanan budidaya sudah mulai dikenal di Indonesia sejak zaman Hindu yaitu sekitar 700 tahun yang lalu.

Awalnya tambak hanya digunakan untuk budidaya ikan dan udang, yaitu ikan bandeng (*Chanos-chanos*) dan udang windu (*Penaeus monodon*). Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi pembudidayaan komoditas yang dibudidayakan tidak hanya bandeng dan udang windu. Beberapa biota yang telah dibudidayakan di tambak antara lain udang putih (*Penaeus merguensis*, *P. indicus*), udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*), teripang (*Holothuria sp*), kepiting bakau (*Scyllia serrata*), rumput laut (*Gracilaria sp*), kakap putih (*Lates calcalifer*), kerapu lumpur (*Epinephelus suilus*), kerapu macan (*E. fuscoguttatus*), kerapu bebek (*Cromileptes altivelis*), beronang (*Siganus sp*) dan nila (M Gufran, 2008 : 180).

2.7.1. Tipe Kawasan Pertambakan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Laut dan Pesisir Kabupaten Lamongan Tahun 2008, pengembangan tambak pada kawasan pesisir terdapat berbagai tipe kawasan pantai yang memungkinkan untuk dipertimbangkan sebagai lahan berpotensi. Berdasarkan topografi lahan pertambakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kawasan *intertidal* (tambak layak dan tambak biasa) dan *supratidal* (tambak darat).

- Kawasan *intertidal* adalah wilayah yang tergenang selama muka air pasang tinggi, dan kering dan terjemur pada waktu pasang rendah. Tinggi permukaan air laut selama pasang tinggi tergantung pada faktor-faktor, seperti frekuensi amplitudo pasang, kontur dan elevasi tanahnya serta berbagai penghambat dan perintang aliran air. Kawasan ini pada umumnya ditutupi oleh hutan mangrove. Pembangunan tambak di kawasan seperti ini akan memerlukan waktu yang lama, untuk perbaikan mutu lahan, yang disebabkan oleh masalah keasaman tanah.
- Kawasan *supratidal* adalah areal di atas jangkauan pasang, air laut masuk ke kawasan ini hanya pada saat pasang tinggi tertinggi. Bagian terbesar kawasan ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yang memerlukan air atau pertanian lahan basah seperti padi, jagung dan sayuran. Konsep budidaya perikanan pada kawasan seperti ini adalah dengan menggunakan pompa sebagai alat pemasok air laut. Tanah permukaan dan lapisan di bawahnya, di suatu areal yang normal,

secara geokimiawi sudah mantap. Pembangunan tambak di kawasan ini sangat mudah dilaksanakan.

2.8. Evaluasi Kemampuan Lahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, evaluasi kemampuan lahan didefinisikan sebagai proses menduga sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaannya. Kerangka dasar evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat atau kualitas lahan yang bersangkutan. Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayah dengan persyaratan penggunaan yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan tersebut potensial untuk dikembangkan.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas dan unit pengelolaan. Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan kelas lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas III dan kelas IV masih dapat digunakan untuk pertanian. Keterangan lebih rinci mengenai klasifikasi kelas lahan dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Klasifikasi Kemampuan Lahan Dalam Tingkat Kelas

Kelas	Kriteria	Penggunaan
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian 3. Karakteristik lahannya antara lain : topografi hampir datar, datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menaahan air baik, subur, tidak terancam banjir. 	Pertanian a. Tanaman pertanian semusim b. Tanaman rumput c. Hutan dan cagar alam
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konsevasi untuk mencegah kerusakan. 	Pertanian a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput padang c. Hutan produksi

- | | |
|---|--|
| <p>III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut. <p>IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. <p>V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terancam erosi tetap mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya. 2. Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman. 3. Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai. <p>VI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi. <p>VII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan karena itu pemafaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi hutan dilakukan pencegahan erosi yang berat. <p>VIII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya dibiarkan secara alami 2. Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi. | <p>d. Hutan lindung
e. Cagar alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman semusim b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah c. Tanaman rumput d. Padang rumput e. Hutan produksi f. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya b. Tanaman rumput c. Hutan produksi d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam 2. Non pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan suaka alam 2. Non pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Padang rumput b. Hutan produksi |
|---|--|

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009

2.8.1. Faktor-Faktor Klasifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009 mengenai Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Penentuan klasifikasi pada kategori unit pengelolaan terbagi atas dua faktor yaitu faktor utama atau faktor penghambat yang bersifat permanen dan faktor khusus. Faktor utama dalam penilaian kemampuan lahan meliputi kelerengan, tekstur tanah dan kedalaman efektif tanah, sedangkan faktor khusus meliputi kondisi drainase, tingkat erosi, batuan

dan ancaman banjir atau genangan air yang tetap. Adapun penggolongan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

A. Faktor utama merupakan faktor penghambat yang bersifat permanen dalam penentuan klasifikasi kemampuan lahan yang meliputi :

1. Tekstur tanah (t)

Tekstur tanah adalah keadaan kasar halusya tanah yang ditentukan atau dinilai berdasarkan perbandingan (komposisi) kandungan fraksi-fraksi pasir, debu dan liat.

Tekstur tanah dikelompokkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut :

- t_1 = halus: lat, liat berdebu
- t_2 = agak halus: liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir.
- t_3 = sedang: debu, lempung berdebu, lempung
- t_4 = agak kasar: lempung berpasir
- t_5 = kasar: pasir berlempung, pasir.

2. Kedalaman efektif (k)

Yang dimaksud kedalaman efektif adalah kedalaman tanah sampai sejauh mana tanah dapat ditumbuhi akar, menyimpan cukup air dan hara. Jadi pada umumnya kedalaman efektif dibatas adanya kerikil dan bahan induk atau lapisan keras yang lain. Kedalaman efektif (k) dikelompokkan meliputi sebagai berikut :

- k_0 = dalam: >90 cm
- k_1 = sedang: 90-50 cm
- k_2 = dangkal: 50-25 cm
- k_3 = sangat dangkal: <25 cm

3. Lereng permukaan (l)

Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal, dinyatakan dalam persen (%) dan menunjukkan perbandingan antara beda tinggi dua titik diatas permukaan tanah dengan jarak proyeksi antara du titik tersebut. Lereng permukaan (l) dikelompokkan sebagai berikut :

- $l_0 = (A) = 0-3\%$: datar
- $l_1 = (B) = 3-8\%$:landai/berombak
- $l_2 = (C) = 8-15\%$: agak miring/bergelombang

- $I_3 = (D) = 15-30\%$: miring berbukit
- $I_4 = (E) = 30-45\%$: agak curam
- $I_5 = (F) = 45-65\%$: curam
- $I_6 = (G) = >65\%$: sangat curam

B. Faktor-faktor khusus

Faktor-faktor penghambat lain yang mungkin terjadi yaitu berupa drainase tanah, erosi, kondisi batuan dan ancaman banjir dan genangan

1. Drainase tanah (d)

Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah dalam kondisi jenuh air atau menunjukkan kecepatan perpindahan air dari permukaan tanah dengan cara meresap atau mengalir. Tidak selalu tanah yang memiliki permeabilitas dan porositas baik akan mempunyai drainase yang baik pula. Drainase tanah diklasifikasikan sebagai berikut :

- $d_0 =$ baik : tanah mempunyai peredaran udara baik. Seluruh profil tanah dari atas sampai lapisan bawah berwarna terang yang seragam dan tidak terdapat bercak-bercak.
- $d_1 =$ agak baik : tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu pada lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah.
- $d_2 =$ agak buruk : lapisan atas tanah mempunyai peredaran udara baik. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, kelabu atau coklat. Terdapat bercak-bercak pada saluran bagian lapisan bawah
- $d_3 =$ buruk : bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan) terdapat warna atau bercak-bercak berwarna kelabu, coklat dan kekuningan.
- $d_4 =$ sangat buruk : seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak-bercak kelabu, coklat dan kekuningan.

2. Erosi (e)

Erosi adalah pengikisan lapisan atas tanah oleh suatu kekuatan atau aksi yang mengakibatkan terangkatnya atau terkikisnya lapisan tanah ke tempat lain. Penilaian erosi didasarkan pada gejala erosi yang sudah terjadi. Kerusakan erosi dikelompokkan sebagai berikut :

- $e_0 =$ tidak ada erosi

- e_1 = ringan: <25% lapisan atas hilang
- e_2 = sedang: 25-75% lapisan atas hilang, <25% lapisan bawah hilang.
- e_3 = berat: >75% lapisan atas hilang, <25% lapisan bawah hilang.
- e_4 = sangat berat : sampai lebih dari 25% lapisan bawah hilang.

3. Batuan

Bahan kasar dapat berada dalam lapisan tanah atau di permukaan tanah, bahan kasar yang terdapat dalam lapisan 20 cm atau di bagian atas tanah yang berukuran lebih besar dari 2 mm dibedakan sebagai berikut :

- Kerikil, merupakan bahan kasar yang berdiameter lebih besar dari 2mm atau sampai 7,5 mm jika berbentuk bulat atau sampai 15 cm sumbu panjang jika berbentuk gepeng.
- Batuan kecil, merupakan bahan kasar atau batuan berdiameter 7,5 cm sampai 25 cm jika berbentuk bulat, atau sumbu panjangnya berukuran 15 cm sampai 40 cm jika berbentuk gepeng.
- Batuan lepas (stone), merupakan batuan yang bebas dan terletak di atas permukaan tanah, berdiameter lebih besar dari 25 cm (berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk gepeng).
- Batu terungkap (rock), merupakan batuan yang tersingkap di atas permukaan tanah, yang merupakan bagian dari satuan besar yang terbenam di dalam tanah (batuan tertutup).

4. Ancaman banjir/genangan.

Ancaman banjir atau genangan dikelompokkan sebagai berikut :

- o_0 = tidak pernah: dalam periode satu tahun tanah tidak pernah tertutup banjir untuk waktu yang lebih dari 24 jam
- o_1 = kadang-kadang: banjir yang menutupi tanah lebih dari 24 jam, terjadinya tidak teratur dalam periode kurang dari satu bulan.
- o_2 = selama waktu satu bulan dalam setengah tahun tanah secara teratur tertutup banjir untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.
- o_3 = selama waktu 2-5 bulan dalam setahun, secara teratur selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam.
- o_4 = selama waktu enam bulan atau lebih tenah selalu dilanda banjir secara teratur yang lamanya lebih dari 24 jam.

Tabel 2.2. Klasifikasi Kemampuan Lahan

No	Faktor pembatas	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Tekstur tanah	$t_2 - t_3$	$t_1 - t_4$	$t_1 - t_4$	$t_1 - t_4$	$t_1 - t_4$	$t_1 - t_4$	$t_1 - t_4$	t_5
2	Lereng permukaan	l_0	l_1	l_2	l_3	$l_0 - l_3$	l_4	l_5	l_6
3	Kedalam efektif	k_0	k_0	k_1	k_2	$k_0 - k_2$	$k_0 - k_2$	$k_0 - k_3$	$k_0 - k_3$
4	Drainase	$d_0 - d_1$	$d_0 - d_2$	$d_0 - d_3$	d_4	$d_0 - d_4$	$d_0 - d_4$	$d_0 - d_4$	$d_0 - d_4$
5	Erosi	e_0	e_1	e_1	e_2	$e_0 - e_2$	e_3	e_4	$e_0 - e_4$
6	Kerikil/batuan	b_0	b_0	b_0	b_1	b_2	$b_0 - b_2$	$b_0 - b_2$	b_3
7	Banjir	o_0	o_0	$o_0 - o_2$	o_3	$o_0 - o_4$	$o_0 - o_4$	$o_0 - o_4$	o_5

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009

2.9. Sarana Pendukung Kegiatan Budidaya Perikanan

Prasarana perikanan lainnya yang sejak dulu sudah ada adalah saluran tambak yang dibangun secara tradisional oleh para petani tambak, yang berfungsi untuk mengatur dan menjamin suplai air laut dan air tawar atau air payau ke dalam tambak.

Fasilitas-fasilitas yang dibangun pada saluran tambak antara lain sebagai berikut :

- Fasilitas pokok
Badan saluran dengan fasilitas perlengkapan berupa bangunan sadap, bangunan bagi, pintu air dan tanggul.
- Fasilitas pelindung
Meliputi tanaman pelindung dan jalur hijau.
- Fasilitas penunjang
Meliputi jaringan jalan, jembatan, instalasi listrik dan instalasi air bersih
- Fasilitas lelang atau Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT)

2.10. Penyediaan Infrastruktur Penunjang

2.10.1. Sarana Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Jawa Timur No. 045.2/ 2289/ 102/ 2000 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, ketentuan sarana perdagangan dan jasa untuk lingkungan perumahan perdesaan dan kota kecil ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. Ketentuan Sarana Perdagangan dan Jasa

No.	Jenis Sarana	Keterangan
1	Warung	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari. • Lokasi terletak di tempat pusat lingkungan yang mudah dicapai dan • mempunyai radius maksimum 500 meter. • Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m² termasuk gudang kecil.

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 2 | Pertokoan | <ul style="list-style-type: none"> • Luas tanah yang dibutuhkan bila berdiri sendiri (tidak bersatu dengan • rumah tinggal) adalah \pm 100 m². • Fungsi utama adalah menjual barang-barang keperluan sehari-hari berupa toko-toko PD. • Lokasinya terletak di pusat kota dan tidak menyebrang jalan • lingkungan, dekat dengan taman tempat bermain. • Luas tanah yang dibutuhkan adalah 1.300 m² dengan building coverage 40%. • Sarana pelengkap yang seharusnya ada: <ul style="list-style-type: none"> – Tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama – kegiatan lain pada pusat lingkungan. – Sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan aktivitas ibu, balai pengobatan, dan balai pertemuan RW. – Pos hansip. |
| 3 | Pusat perbelanjaan kawasan | <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan di lingkungan yang menjual • keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, • pakaian, alat pendidikan, alat rumah tangga, dan lain-lain. • Terdiri dari pasar, toko-toko lengkap dengan bengkel-bengkel kecil • seperti reparasi radio, kompor, setrika, sepeda, dan motor. • Lokasinya pada jalan utama lingkungan dan mengelompok dengan pusat lingkungan. • Mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. • Luas tanah yang dibutuhkan adalah 13.500 m². • Prosentase terhadap area permukiman yang dilayani adalah 0,937% (0,9-1%). • Sarana-sarana pelengkap yang seharusnya ada adalah tempat parkir umum, pos polisi, dan pos pemadam kebakaran. |

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Jawa Timur No.045.2/2289/102/2000

2.10.2. Prasarana Transportasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Jalan, sistem jaringan jalan terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul distribusi barang dan jasa yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun

2004 Pasal 8 tentang Jalan menyatakan bahwa jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi :

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

2.10.3. Jaringan Utilitas

A. Air Bersih

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Jawa Timur No. 045.2/ 2289/ 102/ 2000 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, ketentuan air bersih untuk lingkungan perumahan perdesaan dan kota kecil adalah:

1. Air bersih adalah air yang memenuhi syarat untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak (Standar kualitas air bersih sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 416/ MENKES/ IX.1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air).
2. Lingkungan perumahan harus tersedia air bersih yang cukup dari jaringan perdesaan dan kota.
3. Penyediaan air bersih perdesaan dan kota kecil atau penyediaan air bersih lingkungan harus dapat melayani kebutuhan perumahan dengan persyaratan sambungan rumah dengan kapasitas minimum 60 liter/ orang/ hari.

B. Listrik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Jawa Timur No. 045.2/ 2289/ 102/ 2000 tentang Pedoman Teknik

Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, ketentuan penyediaan listrik untuk lingkungan perumahan perdesaan dan kota kecil:

1. Setiap perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik untuk lingkungan perumahan sederhana dan tidak bersusun harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap unit harus mendapatkan daya listrik untuk keperluan penerangan.
 - b. Dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan lingkungan.
2. Sumber daya listrik dipandang dari segi instalasi yang menyediakan adalah sebagai berikut:
 - a. Sumber daya dari jaringan PLN.
 - b. Sumber daya yang diusahakan sendiri oleh lingkungan.
3. Setiap tipe unit kediaman dibatasi penjatahan daya listrik sesuai dengan ketentuan PLN dan diatur dengan kebutuhan jumlah titik lampu dan stop kontak. Satu unit kediaman minimum disediakan jatah 450 VA.

C. Telepon

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Jawa Timur No. 045.2/ 2289/ 102/ 2000 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, ketentuan jaringan telepon untuk lingkungan perumahan perdesaan dan kota kecil adalah:

1. Perumahan kawasan perdesaan dan kota kecil sebaiknya dilengkapi dengan jaringan telepon umum berisolasi, yang sumbernya diperoleh dari Telkom.
2. Jaringan telepon dalam rumah harus dibuat sedemikian rupa sehingga dimungkinkan pemasangan di kemudian hari tanpa merugikan penghuni.

2.11. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Perikanan Budidaya

2.11.1. Faktor-Faktor Pengembangan Produksi Pertanian

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan produksi pertanian terdiri atas lima faktor, yaitu; faktor keruangan (lokasi), kelembagaan, teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi (Soemarno, 1996). Kelima faktor ini akan dipergunakan dalam untuk menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh bagi pengembangan sentra produksi budidaya perikanan di Kecamatan Brondong.

A. Keruangan (lokasi)

Pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin kesempatan ekonomi yang dimiliki lahan. Kesempatan ekonomi yang diaksud selain ditentukan oleh faktor-faktor internal yang melekat pada lahan, seperti ketersediaan unsur hara, ketebalan lapisan tanah dan faktor-faktor lainnya, juga ditentukan oleh faktor eksternal seperti aksesibilitas lokasi. Kawasan yang secara fisik memiliki semua persyaratan untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan budidaya tidak akan berkembang semestinya jika tidak memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup. Bahasan tersebut memperlihatkan pula pengaruh sistem pelayanan transportasi dari lokasi budidaya ke pusat-pusat pelayanan lokal dan regional.

B. Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud meliputi kelembagaan formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun kelembagaan nonformal yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat setempat. Jenis kelembagaan yang dibutuhkan untuk menunjang program pengembangan produksi pertanian antara lain kelembagaan yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran, dan keuangan.

C. Teknologi

Peranan teknologi merupakan salah satu faktor penentu untuk menaikkan tingkat produktivitas dan daya saing komoditas. Teknologi tepat guna perlu dikaji pada perguruan tinggi dan balai penelitian pertanian. Untuk meningkatkan daya guna penelitian pada, instansi pemerintah terkait bersama dengan lembaga penelitian perlu menyusun cetak biru kegiatan penelitian.

D. Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia (keterampilan dan pengetahuan) menentukan kualitas hasil produksi dan tingkat produktivitas. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan pengembangan pendidikan formal maupun non formal serta pusat-pusat pelatihan pada kawasan-kawasan pengembangan pertanian. Peningkatan keterampilan masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem kelembagaan yang sudah ada, dan memanfaatkan program pengabdian masyarakat. Faktor ini banyak berkaitan dengan usaha-usaha pengalihan teknologi baru.

E. Sistem informasi

Sistem informasi dibutuhkan sebagai media pengalihan ilmu dan teknologi/keterampilan kepada masyarakat, juga berfungsi untuk memberikan informasi pasar kepada para petani, serta hal-hal lain yang secara langsung dan tidak langsung

berkaitan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas kegiatan pertanian. Disamping itu, keberadaan sistem informasi diperlukan bagi para perencana/pemerintah untuk memantau sampai seberapa jauh suatu kebijakan memberikan hasil. Sistem informasi yang handal memungkinkan pengambil kebijakan untuk segera mengevaluasi kebijakan yang ada.

2.11.2. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Perikanan

Faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengembangan kegiatan budidaya perikanan meliputi tujuh faktor, yaitu; faktor pemilihan lokasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana, alat dan bahan, sistem pemasaran, keamanan usaha, dan partisipasi dan kemitraan (M Gufran, 2008 : 153). Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam untuk menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh bagi pengembangan sentra produksi budidaya perikanan di Kecamatan Brondong.

1. Pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih untuk pengembangan usaha budidaya peruntukannya harus jelas sehingga tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat daerah setempat. Peruntukan lahan untuk usaha harus jelas dan pasti, sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah setempat. Peruntukan lahan yang jelas ini penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar di kemudian hari.

Lokasi yang dipilih untuk pembuatan tambak dan kolam, kepemilikan lahannya harus jelas. Apakah status tanah tersebut sebagai tanah adat, tanah garapan, tanah milik perorangan, tanah negara ataupun tanah yang berada pada kawasan konservasi. Untuk usaha budidaya yang dikembangkan di kawasan pesisir pantai, sungai, waduk dan danau, harus mengacu pada tata ruang peruntukannya.

2. Tenaga kerja

Usaha budidaya skala besar membutuhkan tenaga kerja dari luar (di luar investor/pemilik). Sedangkan budidaya perikanan skala kecil, yang biasa dilakukan oleh petani ikan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak karena semua kegiatan dilakukan oleh pemilik usaha budidaya.

Dalam usaha budidaya perikanan skala besar, dikenal dua macam kategori tenaga kerja, yaitu tenaga kerja biasa dan tenaga kerja khusus (ahli). Tenaga kerja biasa dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, seperti penggalian, penimbunan dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja khusus dibutuhkan untuk

melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian seperti sebagai teknisi dan konsultan untuk pengelolaan budidaya perikanan, seperti ahli pakan, ahli penyakit dan sebagainya.

3. Sarana dan prasarana

Lokasi yang dipilih untuk membuka usaha budidaya harus dijangkau dengan mudah dari berbagai arah agar pengadaan benih, pengadaan alat dan bahan, pengadaan pakan, pemasaran hasil panen dan keperluan kebutuhan lainnya dapat berjalan lancar. Artinya, sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan lokasi budidaya tersebut tersedia secara memadai.

Sarana dan prasarana perlu dipertimbangkan menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budidaya seperti sistem jaringan listrik, sistem jaringan air bersih yang meliputi sumber air, kualitas dan kuantitas air. Penyediaan sumber air sangat mempengaruhi perkembangan perikanan budidaya, jenis sumber air yang dimanfaatkan untuk perikanan budidaya sangat tergantung dari jenis komoditas yang dibudidayakan, sumber air dapat berasal dari air payau (campuran air tawar dan air sungai), air sungai maupun air hujan pengangkutan bahan dan alat. Sistem jaringan irigasi memiliki peran penting terutama berfungsi untuk mengatur sirkulasi air dalam budidaya pertambakan.

4. Alat dan bahan

Ketersediaan alat dan bahan di sekitar lokasi budidaya, ikut menentukan biaya investasi. Alat dan bahan yang jauh dengan lokasi usaha sudah pasti memperbesar biaya investasi karena untuk pengadaannya membutuhkan tenaga kerja dan transportasi.

Alat dan bahan tidak hanya dibutuhkan/digunakan pada awal usaha, tetapi selama usaha berlangsung, maka perlu disediakan dalam jumlah yang cukup. Untuk itu, perlu disediakan gudang khusus untuk menyimpan alat dan bahan tersebut.

5. Sistem pemasaran

Pasar sangat penting untuk kelangsungan produksi. Jika kemampuan pasar untuk menyerap produksi sangat tinggi, budidaya perikanan seperti udang, ikan, kepiting tidak menjadi masalah. Dengan harga jual yang sesuai sehingga menghasilkan keuntungan. Sebaliknya jika pasar tidak menyediakan kemungkinan menyerap produk hasil budidaya sehingga menyebabkan usaha budidaya mengalami kerugian.

Apabila produksi telah berjalan, keberhasilan usaha budidaya perairan ditentukan oleh kemampuan dalam menganalisis dan mengantisipasi pasar seperti

kemampuan dalam mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi di pasar. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam usaha pemasaran hasil budidaya yang meliputi sasaran pemasaran, persaingan dan strategi pemasaran.

Komoditas yang hendak dikembangkan dalam budidaya perikanan harus memperhitungkan prospek dan peluangnya, termasuk tingkat persaingan. Seringkali harga suatu komoditas sangat murah sehingga tidak mampu menutupi biaya produksi karena ketersediaan di pasar sangat melimpah. Komoditas perikanan, pertanian dan peternakan sudah sering kali menghadapi kondisi pasar yang demikian. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena produksi komoditas pada sektor ini sangat bergantung pada musim.

6. Keamanan usaha

Dalam budidaya perikanan, faktor keamanan usaha sangat penting. Usaha budidaya harus aman, baik dari gangguan teknis seperti hama dan penyakit maupun gangguan yang bersifat non teknis. Jenis komoditas yang dikembangkan pada media budidaya sangat besar kemungkinan untuk diserang dan diganggu oleh hama karena kemampuan biota budidaya untuk menghindar dari serangan hama dibatasi oleh wadah budidaya tersebut. Oleh karena itu, wadah harus selalu dikontrol untuk mencegah gangguan hama. Pencegahan serangan hama juga dilakukan dengan merekayasa wadah budidaya, seperti menutup permukaan wadah serta menjaga agar wadah budidaya tidak mengalami kerusakan yang memberi peluang masuknya hama.

Perlu diperhatikan dalam membuka usaha budidaya pada suatu daerah tidak sampai membawa dampak yang merugikan masyarakat disekitarnya, karena hal ini mengundang protes dan perlawanan dari masyarakat. Pencurian yang dilakukan masyarakat hingga penutupan paksa lokasi usaha merupakan bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat.

7. Partisipasi dan kemitraan

Usaha budidaya perikanan yang dikembangkan harus memperhatikan lingkungan setempat. Adalah sesuatu yang sangat mengerikan jika usaha yang dikembangkan dapat mematikan usaha-usaha masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat lokal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk secara transparan dan proporsional. Usaha-usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat dapat dilibatkan dalam pola kemitraan, yang memungkinkan usaha-usaha rakyat dapat memproduksi komoditas budidaya yang berkualitas. Dengan pola kemitraan petani ikan skala kecil

dapat memproduksi komoditas budidaya unggulan yang mampu diserap pasar, tentu unit usaha skala besar harus memberikan bantuan teknis. Usaha skala besar dapat menjadi penampung produksi yang dihasilkan oleh petani ikan skala kecil.

2.12. Agribisnis Perikanan

Agribisnis meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam manufaktur dan distribusi input produksi, proses produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran komoditi pertanian dan jasa-jasa penunjang lainnya yang terkait. Dengan demikian agribisnis meliputi sektor pertanian dan industri, sedangkan yang dimaksud dengan agribisnis perikanan adalah suatu kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan, hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan perikanan atau kegiatan usaha yang menunjang perikanan. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usahatani, hilir dan penunjang (Syahrani 2001:4). Batasan agribisnis adalah sistem utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan pertanian. Konsep pembangunan ekonomi agribisnis perikanan meliputi empat subsistem, antara lain sebagai berikut :

1. Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yang meliputi kegiatan perencanaan produk, perencanaan lokasi usaha, perencanaan standar produksi, dan pengadaan tenaga kerja, pengadaan dan penyaluran sarana prasarana budidaya perikanan (Rahardi et.al., 2001:6).
2. Subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) yang meliputi kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi perikanan pembudidayaan.
3. Subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah komoditi perikanan menjadi produk olahan, pemasaran dan distribusinya.
4. Subsistem penunjang kegiatan perikanan merupakan kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti perbankan, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, transportasi.

Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sehingga diperlukan sinkronisasi kedua pelaku ekonomi tersebut untuk membangun agribisnis yang tangguh dan berdaya saing

(Soenarno, 2003). Pengembangan agribisnis yang berdaya saing di suatu daerah memerlukan dukungan unsur-unsur penting, yaitu :

- 1) Unsur-unsur pokok, yaitu unsur yang harus ada agar agribisnis berjalan.
- 2) Unsur-unsur penunjang, yaitu unsur-unsur yang akan mempercepat pengembangan agribisnis.

Adapun unsur-unsur pokok yang dimaksudkan tersebut meliputi :

1. Sumberdaya manusia

Responsif terhadap teknologi dan informasi, berorientasi pada pasar berpengetahuan dan berketrampilan teknis, memiliki kemampuan manajemen usaha dan bekerja sama, mempunyai akses terhadap lembaga ekonomi dan riset.

2. Infrastruktur

Sarana perhubungan darat, pelabuhan laut dan transportasi udara yang kesemuanya untuk menghubungkan lokasi produksi dengan pasar dan input produksi, sarana irigasi, drainase dan penampungan air, energi dan air bersih.

3. Teknologi

Kegiatan LITBANG, penyebaran teknologi baru kepada pelaku agribisnis, perbaikan teknologi pembibitan dan budidaya, teknologi mekanisasi budidaya maupun teknologi pengolahan hasil.

4. Kelembagaan agribisnis

Kelompok tani sebagai wadah kerjasama produksi dan memudahkan dalam mengakses teknologi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi petani untuk meningkatkan efisiensi usaha, mengakses kredit, memperlancar pemasaran dan meningkatkan kekuatan tawar menawar. Kemitraan antar pelaku agribisnis atas dasara saling menguntungkan saling percaya dan transparan, perlindungan hukum atas hak, kewajiban dan perjanjian antar pelaku agribisnis.

Sedangkan unsur-unsur penunjang yang dimaksudkan adalah :

1. Informasi

Informasi pasar, informasi potensi wilayah, informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan (teknik dan pengolahan, informasi usaha, kredit, kebijakan dan lainnya).

2. Kredit

Untuk investasi dan modal kerja baik bagi investor maupun petani, serta insentif untuk biaya hidup untuk petani.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam hal investasi, tata ruang wilayah, subsidi dan insentif, pola pengusaha, kepastian hukum, penggunaan dan penguasaan lahan, perencanaan makro pengembangan agribisnis dan lainnya.

4. Pendidikan/pelatihan untuk petani dan aparat pembina

Agribisnis mencakup agroindustri yang mengolah produksi hasil-hasil pertanian maupun industri yang memproduksi masukan-masukan atau prasarana untuk proses produksi/budidaya. Sektor agribisnis mencakup kegiatan yang sangat luas dan mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta industri-industri yang sangat erat dalam memproduksi bahan-bahan masukan produksi maupun industri yang bahan bakunya dari produk pertanian.

2.13. Linkage Sistem Kegiatan Perikanan

Secara sektoral, perkembangan wilayah terjadi melalui satu atau beberapa pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan kegiatan ekonomi akan merangsang diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya, terutama kegiatan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Pengembangan wilayah melibatkan hubungan berbagai kegiatan dalam perekonomian daerah yang luas. Berbagai rangkaian kegiatan memberikan peluang-peluang produksi dari suatu kegiatan ke kegiatan lain di dalam perekonomian daerah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan atau kemunduran wilayah (**Hoover, 1977:37**). Rangkaian ini dapat berupa keterkaitan hulu dan hilir. Berbagai teori tentang pendorong pertumbuhan daerah menekankan peranan permintaan output-output daerah dan rangkaian kegiatan atau sektor ekonomi yang mengarah ke muka (keterkaitan hilir). Konsep teori kutub pertumbuhan menekankan perlunya sektor utama (*leading sector*) dikembangkan disuatu wilayah dan memiliki kaitan-kaitan antar sektor yang kuat dengan sektor-sektor lain. Kaitan-kaitan ini dapat berbentuk (**Glasson 1997:174**) :

- Kaitan ke depan (*forward linkage*), dalam hal ini keterkaitan kegiatan perikanan budidaya dengan pemakai output produksi (industri pengolahan hasil perikanan) beserta wilayah tujuan pemasaran produk perikanan budidaya.

- Kaitan ke belakang (*backward linkage*), dalam hal ini keterkaitan kegiatan perikanan budidaya dengan penyedia input produksi (penyedia benih, pupuk, pestisida dan peralatan budidaya) beserta sektor-sektor pendukungnya.

Keterkaitan yang harmonis antara sub-subsistem agribisnis perikanan mutlak dibutuhkan untuk mencapai tingkat produktifitas dan nilai jual yang tinggi pada komoditi perikanan. Sebagai sebuah pola sistem, agribisnis merupakan sebuah entitas yang ditopang oleh subsistem yang diantara satu sama lainnya terjalin hubungan saling ketergantungan yang agregatif dan berfungsi untuk mencapai seluruh target sistem, bukan sekedar target masing-masing subsistem (Rahardi. F, et al 1993:5).

Kegiatan produksi mekanisme perangsang pembangunan yang tercipta merupakan akibat adanya hubungan antar berbagai industri (sektor) dalam menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah bagi sektor lain. Interaksi ini terdiri atas pengaruh hubungan ke belakang (*backward linkage*) atau keterkaitan hulu, dan pengaruh hubungan ke depan (*forward linkage*) atau keterkaitan hilir. Pengaruh keterkaitan hulu adalah tingkat rangsangan yang ditimbulkan oleh kegiatan perikanan budidaya tersebut terhadap perkembangan sektor lain yang akan menyediakan input bagi sektor perikanan budidaya tersebut. Sedangkan pengaruh keterkaitan hilir adalah tingkat rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu sektor terhadap perkembangan perikanan budidaya yang menggunakan output sektor pertama sebagai inputnya (Hoover, 1971 dalam Kuncoro, 1992 : 150).

2.14. SWOT dan IFAS-EFAS

2.14.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing wilayah atau kawasan yang direncanakan. Analisis ini dilakukan setelah semua analisis telah dilakukan dimana pada tiap-tiap analisis yang dilakukan muncul potensi dan permasalahannya sehingga dari potensi masalah tersebut dapat ditetapkan strategi pengembangan kawasan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta meminimalisasi bahkan menutupi kelemahan serta ancaman yang dihadapi. Kemudian dari hasil analisis SWOT tersebut dapat ditentukan skala prioritas kawasan utama di Kecamatan Brondong. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang dipergunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal

memegang peranan yang sama pentingnya, SWOT merupakan akronim yang terdiri dari konsep atau kata :

- S (strength/kekuatan): suatu kondisi atau keadaan yang dimiliki dan dianggap merupakan hal yang sudah baik.
- W (weakness/kelemahan/masalah): suatu kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah.
- O (opportunity/kesempatan/peluang): suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam dan disekitar daerah yang dianggap berpotensi untuk digunakan bagi pengembangan potensi.
- T (threat/ancaman/hambatan): suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau disekitar daerah yang dianggap dapat menghambat atau mengancam pengembangan potensi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan kelemahan merupakan faktor intern, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor ekstern. SWOT digunakan untuk menetapkan tujuan secara realistis dan efektif, dari SWOT tersebut maka dapat diperoleh strategi yang prinsipnya merupakan :

- Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada secara terbuka
- Strategi yang mengatasi ancaman yang ada
- Strategi yang memperbaiki kelemahan yang ada

Dalam pemanfaatan SWOT, terdapat beberapa alternatif penggunaan yang didasarkan dari kombinasi masing-masing aspek sebagai berikut:

- SO : memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk meraih peluang
- ST : memanfaatkan kekuatan secara maksimal untuk mengantisipasi atau menghadapi ancaman dan berusaha menjadikan ancaman sebagai peluang
- WO : meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang
- WT : meminimalkan kelemahan untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman

		Internal audit	
		Strength	Weakness
Eksternal Environment	Opportuni	SO	WO
	Threat	ST	WT

Gambar 2.2. Matriks SWOT

2.14.2. IFAS-EFAS

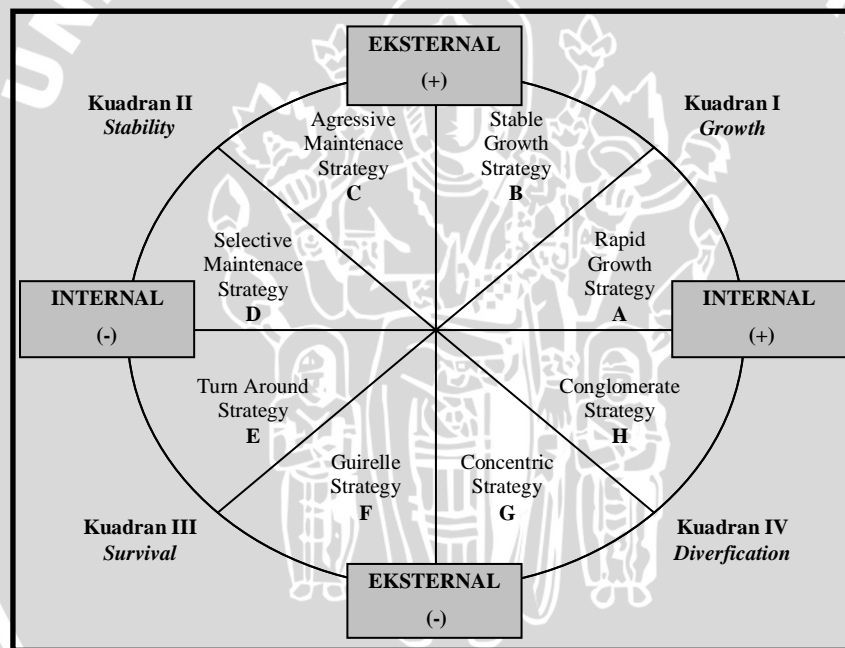
Keempat faktor yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threaten*) masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dari tiap faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi obyek penelitian pada kuadran SWOT.

Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matrik kepada dua kelompok besar yaitu faktor internal (IFAS/ *Internal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (EFAS/ *External Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threaten*). Dari penilaian berdasarkan IFAS dan EFAS diketahui posisi obyek penelitian dalam koordinat pada sumbu x dan y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut:

- 1) Kuadran I (*Growth*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a) Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat.
 - b) Ruang B dengan *Stable Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.
- 2) Kuadran II (*Stability*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a) Ruang C dengan *Agresif Maintenance Strategy* dimana pengelola obyek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.
 - b) Ruang D dengan *Selective Maintenance Strategy* dimana pengelolaan obyek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting.
- 3) Kuadran III (*Survival*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:

- a) Ruang E dengan *Turn Around Strategy*, yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional obyek.
- b) Ruang F dengan *Guirelle Strategy*, yaitu strategi gerilya, sambil operasional dilakukan, diadakan pembangunan pemecahan masalah dan ancaman.
- 4) Kuadran IV (*Diversification*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
- a) Ruang G dengan *Concentric Strategy* dimana strategi pengembangan obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu koordinasi oleh satu pihak.
- b) Ruang H dengan *Conglomerate Strategy* dimana strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor.

Pembagian ruang dalam analisis SWOT dengan penilaian terhadap faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut;



Gambar 2.3. Pembagian Ruang dalam Kuadran SWOT (IFAS/ EFAS)

a. *Matrik IFAS (Internal Strategic Faktors Analysis Summary)*

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) adalah:

1. Kolom 1 disusun faktor-faktor kekuatan dan kelemahan.
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00. Masing-masing nilai diperoleh berdasarkan hasila analisis korelasi atau besarnya pengaruh masing-masing faktor.

3. Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan persepsi masyarakat dan hasil cross check di lapangan terhadap faktor- faktor yang berpengaruh.
4. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik). Variabel yang bersifat negatif nilainya adalah 1. Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1 (poor).
5. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan.

Matrik EFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal EFAS adalah :

1. Kolom 1 disusun peluang dan ancaman
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
3. Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut.
4. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 4. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 1.
5. Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan.

2.15. Konsep Penataan Ruang Kegiatan Perikanan

2.15.1. Konsep Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Suatu kegiatan perikanan yang produktif akan memilih lokasi yang dapat memperoleh input secara efisien, input tersebut tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berbentuk jasa, seperti : jasa sarana dan prasarana, institusi pendukung, maupun kualitas sumberdaya manusia (Maryunani, 2003:1). Sarana dan prasarana dapat berupa alat atau tempat yang paling utama, dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi, sarana dan prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan perkembangan suatu wilayah (Jayadinata, 1991:25). Adapun beberapa ciri bagi sarana/prasarana ekonomi antara lain : (a) sarana/prasarana mampu menyediakan pelayanan yang merupakan dasar bagi tiap kapasitas produksi, (b) instalasi besar dan mahal, (c) tidak dapat diimpor.

Menurut Soenarno (2003:14) pembangunan sarana-prasarana ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum. Sarana dan prasarana tersebut merupakan barang publik (*public good*) atau semi publik (*semi public good*) sehingga pembangunannya harus diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah bersama masyarakat (swasta). Pembangunan sarana dan prasarana secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kegiatan perikanan. Khususnya pada kawasan yang mana terdapat potensi sumberdaya yang besar namun pemanfaatannya masih sangat rendah dan membutuhkan pembangunan fisik sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.

Pengadaan sarana dan prasarana perikanan dimaksudkan untuk merangsang peningkatan produksi, pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan. Dalam konsep pengembangan wilayah agropolitan, terdapat beberapa sarana dan prasarana pokok yang harus ada untuk menunjang berjalannya sistem agribisnis.

Tabel 2.4. Sarana Dan Prasarana Agribisnis

Sarana/prasarana	Jenis sarana/prasarana
Pasar	Pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar lelang (subterminal agribisnis)
Lembaga keuangan	Bank, lembaga keuangan non bank
Balai penyuluhan pertanian	Klinik konsultasi agribisnis (tempat percontohan agribisnis, sumber informasi dan pusat pemberdayaan dan penyuluhan usaha agribisnis)
Pengkajian teknologi agribisnis	Badan kajian inovasi teknologi tepat guna untuk usahatani dan produk olahannya
Prasarana aksesibilitas	Jalan, listrik, air bersih
Kelembagaan petani	Koperasi, asosiasi petani pembudidaya, kelompok tani dan kelompok usaha kemitraan

Sumber : Soenarno : 2003

Pengadaan sarana dan prasarana produksi perikanan dilaksanakan baik sebagai upaya langsung pemerintah melalui pembangunan ataupun dengan menarik peran serta swasta melalui penciptaan iklim yang kondusif. Industri yang mengolah kekayaan alam, seperti perikanan, dapat beroperasi menjadi suatu kegiatan yang bersifat enclave dengan mengusahakan sendiri berbagai infrastruktur, tetapi hal ini pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar (Maryunani, 2003:6). UU No 31 Tahun 2004 pasal 18 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa pemerintah membangun dan membina prasarana perikanan. Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukan, sarana/prasarana budidaya perikanan dibagi atas tiga kelompok besar yang meliputi sarana/prasarana pembudidayaan, sarana/prasarana pengolahan dan sarana/prasarana penunjang.

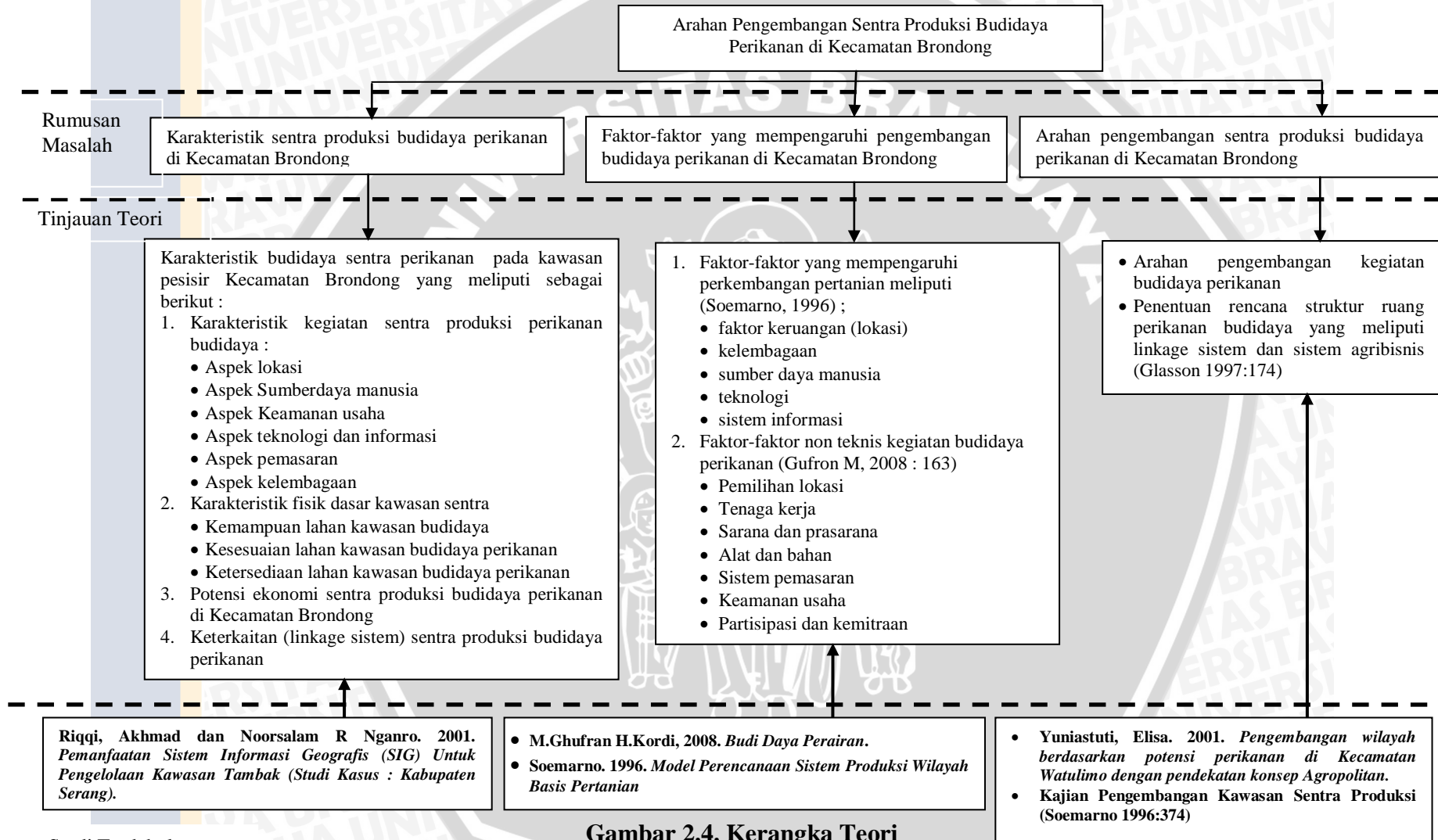
2.15.2. Keterkaitan Spasial Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah

Penciptaan dan penguatan keketrkaitan penting dalam pengembangan wilayah karena keterkaitan yang kuat akan mendorong perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Dalam perencanaan pengembangan wilayah inti dari keterkaitan (*linkage*) adalah dikembangkannya dua bentuk keterkaitan, yaitu keterkaitan secara fungsional dan keterkaitan secara spasial. Pada bagian ini akan dikaji secara spesifik mengenai konsep keterkaitan spasial dalam pengembangan ekonomi wilayah, khususnya kegiatan ekonomi yang berbasis pesisir dengan fokus pada kegiatan perikanan :

Wilayah merupakan satu kesatuan sistem kegiatan yang beragam fungsinya dan saling tergantung satu sama lain. Dalam pengembangan wilayah, proses saling keterhubungan dari berbagai fungsi ini dibentuk oleh keterkaitan yang terjadi di berbagai tempat yang terdapat di suatu wilayah. Dalam keterkaitan spasial, salah satu faktor yang dianalisis secara mendalam adalah aliran barang/komoditi secara spasial antar daerah dan antar wilayah. Hal ini disebabkan karena perekonomian satu wilayah memiliki sifat relaitf terbuka, yang berarti antara suatu wilayah dengan wilayah lain dapat terjadi hubungan input-output antara kegiatan ekonomi.

Interaksi antar wilayah ini berbentuk keterkaitan ke depan (hulu) dan ke belakang (hilir), karena hulu suatu sektor dari suatu wilayah mungkin saja berada pada wilayah lain. Dengan demikian perkembangan suatu kegiatan di suatu wilayah dapat menimbulkan perkembangan kegiatan di wilayah lain. Selain itu, secara spasial perkembangan wilayah terjadi melalui pertumbuhan, diversifikasi ditinjau intenal suatu sistem, keterkaitan spasial mengisyaratkan pengembangan komoditi pada wilayah tertentu, yang dikaitkan antara produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran melalui pengadaan prasarana, merencanakan berbagai kegiatan atau fasilitas yang saling menunjang dalam suatu lokasi. Dengan demikian suatu kegiatan pada lokasi tertentu akan mempengaruhi kegiatan lain ditempat terpisah. Ketekaitan spasial seharusnya membentuk sistem aliran komoditi antara satu subsistem ke subsistem lainnya dalam suatu sistem, dari suatu tempat ke tempat lain secara berkesinambungan, sehingga setiap kegiatan pada masing-masing subsistem dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tingkat efisiensi yang tinggi (Rahardi. F, et al 1993:5).

2.16. Kerangka Teori



Gambar 2.4. Kerangka Teori

2.17. Studi Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan materi sesuai dengan kajian yang dilakukan karena dua pertimbangan dasar yaitu :

- Mempermudah proses penelitian dengan menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi kajian ini.
- Menjaga keaslian penelitian menghindari kemungkinan duplikasi atau kesamaan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Uraian judul, penulis, institusi tempat penelitian dilakukan serta hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut.



Tabel 2.5. Tinjauan Penelitian Sejenis

No.	Judul Penelitian / Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Arahan pengembangan subsektor perikanan dengan pendekatan konsep agropolitan, Studi kasus kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB, 2006)	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik spasial - Karakteristik non spasial - Kesesuaian konsep agropolitan - Subsektor perikanan 	Analisis pengembangan kegiatan perikanan laut yang meliputi analisis pengembangan potensi perikanan tangkap dan pemasaran perikanan hasil perikanan laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengidentifikasian karakteristik subsektor perikanan di Kecamatan Nguling yang meliputi karakteristik spasial dan non spasial - Penerapan kesesuaian konsep agropolitan pada subsektor perikanan di Kecamatan Nguling - Arahan pengembangan berupa program penataan ruang dan pengembangan kawasan pesisir dalam kaitan dengan potensi subsektor perikanan.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan wilayah studi. - Cakupan sektor yang diteliti difokuskan pada subsektor perikanan tangkap.
2	Pemanfaatan SIG Untuk Pengelolaan Kawasan Tambak, Studi Kasus : Kabupaten Serang (Akhdad Riqqi ST, MSi dan Dr. Noorsalam R Nganro, Teknik Geodesi, ITB tahun 2001)	<ul style="list-style-type: none"> - Guna lahan - Kondisi fisik dasar lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kesesuaian lahan digunakan untuk mengetahui kesesuaian suatu lokasi tambak dengan menggunakan konsep evaluasi lahan - Analisis Keberlanjutan lahan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan tambak agar produksi udang dapat dipertahankan dan dapat memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengidentifikasian tingkat kesesuaian lahan dan keberlanjutan lahan pada kawasan tambak di Kabupaten Serang yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai konsep pengelolaan tambak secara berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian yang dilakukan terbatas pada pemanfaatan sumberdaya lahan budidaya perikanan
3	Pengembangan wilayah berdasarkan potensi perikanan di Kecamatan Watulimo dengan pendekatan konsep Agropolitan (Elisa Yuniastuti 2001/PWK-	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan pesisir - Perikanan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis keterkaitan spasial dalam kegiatan perikanan - Analisis kegiatan fungsional perikanan - Analisis daya dukung sumber daya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem agribisnis dalam pengembangan subsektor perikanan sebagai dasar dalam upaya pengembangan kawasan di Kecamatan Watulimo baik secara fisik, ekonomi, sosial dan spasial. - Penggunaan pendekatan agropolitan sebagai arahan pengembangan kawasan di 	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan wilayah studi. - Cakupan sektor yang diteliti difokuskan pada subsektor perikanan tangkap.

No.	Judul Penelitian / Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
4	UB) Kajian pengembangan sentra jeruk pamele di Kabupaten Magetan (Choirul Maulidi 2008/PWK-UB)	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik fisik - Karakteristik kegiatan perkebunan jeruk pamele di Kab. Magetan - Potensi ekonomi perkebunan jeruk pamele di Kab. Magetan - Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan jeruk pamele yang meliputi faktor lokasi, kelembagaan, SDM, teknologi dan sistem informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis pengembangan agribisnis perikanan - Analisis deskriptif evaluatif, menggunakan rumus LQ - Analisis deskriptif evaluatif, menggunakan rumus <i>Shift-Share</i> - Analisis evaluatif dengan metode analisis faktor menggunakan <i>software SPSS</i> - Analisis deskriptif evaluatif, dengan metode diagram akar masalah dan dibantu dengan <i>photomapping</i> - Analisis evaluatif, dengan metode proyeksi - Analisis <i>developmet</i>, dengan metode SWOT dan IFAS-EFAS 	<p>Kecamatan Watulimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengidentifikasian karakteristik perkebunan jeruk pamele di Kabupaten Magetan, yang meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian karakter fisik • Pengkajian karakter kegiatan perkebunan • Pengkajian potensi ekonomi dari perkebunan - Pengkajian faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan perkebunan jeruk pamele di Kabupaten Magetan - Penentuan strategi dan konsep pengembangan sentra jeruk pamele di Kabupaten Magetan - Penyusunan arahan pengembangan sentra produksi jeruk pamele di Kabupaten Magetan 	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan wilayah studi - Cakupan sektor yang diteliti difokuskan pada sektor pertanian pada komoditas perkebunan jeruk pamele - Pengkajian faktor berasal dari satu sumber yaitu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian (Soemarno, 1996)

Adapun perbedaan studi ini dengan studi-studi terdahulu antara lain sebagai berikut :

1. Studi dilakukan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Studi membahas subsektor perikanan sebagai dasar dalam pengembangan kawasan, subsektor yang akan dikaji memiliki lingkup yang lebih luas yaitu budidaya perikanan yang meliputi karakteristik kegiatan budidaya perikanan.
3. Analisis yang dipergunakan meliputi analisis deskriptif karakteristik kegiatan perikanan, analisis fisik dasar kawasan dan analisis evaluatif meliputi analisis LQ, analisis Growth Share dan analisis faktor, sedangkan analisis development meliputi analisis potensi masalah dan analisis SWOT.
4. Studi mengkaji arahan pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Brondong yang meliputi arahan pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan arahan struktur ruang kawasan sentra produksi budidaya perikanan, arahan area pengembangan sentra produksi budidaya perikanan dan arahan linkage sentra produksi budidaya perikanan.



Contents

BAB II 14

TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Pengertian Wilayah	14
2.2. Pengertian Kawasan	14
2.3. Kawasan Sentra Produksi.....	14
2.3.1. Asas Pengembangan Sentra Produksi	15
2.3.2. Kajian Pengembangan Sentra Produksi	16
2.4. Kawasan Sentra Agribisnis (KSA).....	19
2.4.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan KSA	19
2.4.2. Ruang Lingkup Materi Pengembangan KSA	21
2.4.3. Ruang Lingkup Wilayah KSA	22
2.5. Jenis Usaha Perikanan.....	23
2.5.1. Perikanan Tangkap	24
2.5.2. Perikanan Budidaya.....	24
2.5.3. Budidaya Perikanan.....	25
2.6. Nelayan.....	26
2.7. Tambak.....	26
2.7.1. Tipe Kawasan Pertambakan	27
2.8. Evaluasi Kemampuan Lahan.....	28
2.8.1. Faktor-Faktor Klasifikasi	29
2.9. Sarana Pendukung Kegiatan Budidaya Perikanan	33
2.10. Penyediaan Infrastruktur Penunjang	33
2.10.1. Sarana Perdagangan dan Jasa	33
2.10.2. Prasarana Transportasi	34
2.10.3. Jaringan Utilitas.....	35
2.11. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Perikanan Budidaya.....	36
2.11.1. Faktor-Faktor Pengembangan Produksi Pertanian.....	36
2.11.2. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Perikanan.....	38
2.12. Agribisnis Perikanan	41
2.13. Linkage Sistem Kegiatan Perikanan.....	43
2.14. SWOT dan IFAS-EFAS	44
2.14.1. Analisis SWOT	44
2.14.2. IFAS-EFAS	46
2.15. Konsep Penataan Ruang Kegiatan Perikanan	48
2.15.1. Konsep Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	48
2.15.2. Keterkaitan Spasial Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah	50
2.16. Kerangka Teori.....	51
2.17. Studi Terdahulu	52
Tabel 2.1. Klasifikasi Kemampuan Lahan Dalam Tingkat Kelas	28
Tabel 2.2. Klasifikasi Kemampuan Lahan.....	33
Tabel 2.3. Ketentuan Sarana Perdagangan dan Jasa.....	33
Tabel 2.4. Sarana Dan Prasarana Agribisnis.....	49
Tabel 2.5. Tinjauan Penelitian Sejenis.....	53
Gambar 2.1. Konsep Ruang Pengembangan KSA	23
Gambar 2.2. Matriks SWOT	46

Gambar 2.3. Pembagian Ruang dalam Kuadran SWOT (IFAS/ EFAS) 47
Gambar 2.4. Kerangka Teori 51

